

Layanan dan Kerukunan Agama di Perbatasan Negara: Studi Kasus di Distrik Sota Merauke

Muhamad Murtadho

Peneliti Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI

Email: tadho25@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 22 Oktober 2014, diseleksi 4 November 2014, dan direvisi 8 Desember 2014

Abstract

This research aims to examine the needs of religious service and religious harmony in the borderlands of the country. This research uses a case study approach, studying the Sota District in Merauke. Sota District is located at the border between Indonesia and Papua New Guinea. This study finds that the level of religious service provided by the government is still insufficient and needs to be strengthened. Religious leaders lack resources and this is one of the main reasons for decreasing social and religious awareness, which can affect religious harmony. Further, inter-religious harmony in this border region has not been well managed and there is the potential for social disorder in some cases.

Keywords: Religious Service, Religious Harmony, State Borders, Religious Leaders

Pendahuluan

Perbatasan negara Indonesia saat ini masih menjadi latar belakang dari wajah bangsa. Daerah perbatasan identik dengan keterbatasan akses pembangunan dan ketertinggalan dalam pembangunan. Layanan negara biasanya masih minim untuk daerah-daerah seperti itu. Paradigma garis perbatasan sebagai latar depan negara belum menjadi kesadaran umum bangsa Indonesia. Untuk melihat bagaimana bentuk layanan agama dan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan dan kerukunan agama di masyarakat daerah perbatasan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada masyarakat Distrik Sota Merauke (Daerah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini). Penelitian di lapangan menemukan bahwa tingkat pelayanan agama yang diberikan pemerintah di daerah perbatasan negara masih rendah dan perlu penguatan. Lemahnya SDM agamawan daerah perbatasan menyebabkan lemahnya kesadaran beragama dan merambat ke kerukunan beragama. Kerukunan antar umat beragama di daerah perbatasan belum dikelola dengan baik, dan berpotensi melahirkan kerawanan sosial.

Kata Kunci: Layanan Keagamaan, Kerukunan Agama, Perbatasan Negara dan Agamawan

kerukunan umat beragama, tulisan ini akan mencoba mengkaji konteks masalah itu dengan mengambil obyek kajian di Papua. Papua mempunyai garis berbatasan negara secara langsung dengan Papua Nugini.

Papua, dilihat dari kekayaan alamnya, semua orang mengakui bahwa Papua merupakan daerah kaya. Namun, karena rendahnya kualitas sumber daya manusianya menyebabkan masyarakat Papua masih terbelakang

jika dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Sumule mendeskripsikan keterbelakangan Papua sebagai berikut: 1). 74,24% masyarakat Papua tinggal di daerah dengan akses yang sangat terbatas, bahkan tidak ada akses; 2). dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, kurang lebih 80% masyarakat Papua berada dalam posisi terbelakang; 3). kebanyakan masyarakat Papua berada di bawah garis kemiskinan dan hanya 1,1% orang Papua yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi; 4). hampir tidak ada jalan bermutu yang menghubungkan antar daerah; 5). rata-rata harga barang di Papua 45% lebih tinggi dibandingkan di daerah lain; 6). dalam 10 tahun terakhir elastisitas pertumbuhan ekonomi hanya memberikan peningkatan kesempatan kerja sebanyak 0,4% (Sumule, 2006).

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk mendongkrak kemajuan Papua, salah satunya Perpres Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2014 menjadikan Kabupaten Merauke menjadi pusat pengembangan pangan dan energi terpadu atau *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) serta sebagai pusat pengembangan minapolitan. Pengembangan ekonomi wilayah ini diharapkan dapat memunculkan sentra ekonomi yang nantinya akan mendukung pertumbuhan komoditas perbatasan, dalam hal ini komoditas pertanian dan energi sebagai komoditas yang diunggulkan. Pembangunan ini nantinya akan membantu negara dalam sinergisme pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan (Hadi, 2011).

Pembangunan sebuah daerah di Indonesia dalam memajukan daerah itu secara langsung atau tidak langsung melibatkan persoalan agama dan keagamaan masyarakat yang ada. Sebagai

bangsa multikultur dan multireligius, kerukunan hidup umat beragama menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kerukunan hidup umat beragama bahkan menjadi pilar penting bagi terwujudnya kerukunan nasional, dan menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan yang niscaya bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sementara itu, umat beragama yang rukun ditandai oleh sikap-sikap antara lain: toleran, cenderung pada kedamaian/anti kekerasan, gemar bekerjasama, dan terbuka (*open minded*) terhadap forum-forum komunikasi antarumat. Hanya saja, kondisi objektif dewasa ini penduduk Indonesia belum seutuhnya berkarakter sebagaimana seharusnya.

Terkait dengan pembangunan di bidang agama di perbatasan negara, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut: 1). Bagaimana deskripsi layanan agama di Distrik Sota Merauke? 2). Bagaimana gambaran kerukunan agama di daerah perbatasan? 3). Apa yang dibutuhkan masyarakat perbatasan terkait dengan layanan agama dan keagamaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti mengambil kasus umat beragama yang berada di Distrik Sota, sebuah distrik yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data tentang konteks permasalahan masyarakat daerah perbatasan terkait layanan agama dan keagamaan serta permasalahan-permasalahan layanan dan kerukunan agama. Pengumpulan data dilakukan melalui tehnik survei ke lapangan untuk

melakukan pengamatan; wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta studi literatur, selanjutnya dilakukan analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia data dari lapangan dan kepustakaan.

Sekilas Distrik Sota, Merauke

Merauke mulai disebut-sebut menjadi bagian dari Indonesia sejak daerah itu menjadi pintu masuk pembuangan para tokoh nasional ke lokasi pembuangan Van Digoel, Papua. Argumen ini mematahkan anggapan orang Papua yang menyebutkan tidak adanya keterkaitan sejarah antara Papua dengan Indonesia. Sejak tahun 1926, jenderal de Graeff (Belanda) mengirimkan tahanan politik sebanyak 823 orang ke Van Digoel (Wanggai, 2009).

Berdasarkan catatan sejarah, Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang pertama yang menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Mereka mencoba untuk hidup di antara dua suku asli yaitu Marind Anim dan Sohoers. Mereka berjuang keras melawan keganasan alam (termasuk pemburu kepala). Lama kelamaan tempat tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga menjadi sebuah "kota". Dari Merauke, orang Indonesia, Eropa dan Cina, mulai untuk "menyerbu" hutan di selatan Nugini untuk memburu burung sebanyak mungkin. Ketika pemerintah Belanda melarang perburuan, mereka semua kembali ke Merauke untuk menghabiskan uang yang mereka dapatkan (<http://www.kemendagri.go.id>, diakses, 22 Oktober 2014).

Kondisi demografi Kabupaten Merauke merupakan Indonesia mini karena penduduk Merauke sudah heterogen dari berbagai etnis yang ada di Nusantara ini mulai dari suku asli Merauke (Marind, Jei, Kanum dan

Kimaam) juga suku suku lain seperti Maluku, Timor, Bugis Makasar, Manado, Banjar, Dayak, Jawa, Batak dan Aceh juga ada di Merauke ini. Hasil pendataan Biro Pusat Statistik dan juga Data Pemerintah Kabupaten Merauke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang non-Papua lebih besar mencapai 63% dari jumlah penduduk yakni kurang lebih 185.718 jiwa yang sebagian besar merupakan suku Jawa. Hal ini disebabkan sejak masa bergabungnya Irian Barat ke pangkuan NKRI tahun 1963 sudah ada upaya pemerintah mendatangkan transmigran yang ditempatkan di pinggiran Kota Merauke (Sidomulyo, Kumbe dan Kurik). Pada masa Orde Baru, di tahun 80-an program transmigrasi kembali digalakan dalam rangka pemerataan penduduk sekaligus mengolah sumber daya alam yang begitu luas dengan potensi pertanian yang sangat menjanjikan (Sunarjo, 2014).

Adapun Kecamatan Sota terletak di bagian timur Kab Merauke, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Posisi koordinat distrik Sota berada pada 7° 45'00"- 8°50'04' Lintang Selatan dan 140° 41'04' – 141° 12'00' Bujur Timur. Di sana terdapat tugu kembaran dari tugu Sabang-Merauke yang merupakan tugu yang sama yang terdapat di Pulau Sabang Propinsi Aceh. Tidak jauh dari tugu Sabang Merauke, terdapat tugu batas negara yang memisahkan Indonesia dengan Papua Nugini. Distrik Sota merupakan batas negara yang bisa ditempuh dengan jalan darat. Sebenarnya ada tugu batas negara yang lebih selatan lagi, yaitu di Kondo, namun untuk ke sana harus menggunakan perahu motor yang ditempuh kurang lebih memakan waktu sehari.

Distrik Sota berbatasan di sebelah timur (negara Papua Nugini), sebelah Selatan (Kec Nokenjerai), Barat (Distrik Merauke, Distrik Tanah Miring, Distrik

Jagebob), Utara (Distrik Elikobel). Luas Distrik Sota seluas 2.319,071 KM² (5,06 % dari Kabupaten Merauke). Jumlah penduduk di distrik Sota sebanyak 3.051 orang yang terbagi dalam 705 Kepala Keluarga. Persentase penduduk pendatang 70% yaitu para transmigran, dan 30% pribumi. Transmigran datang pada tahun 1995 dalam tiga gelombang yang hanya dibedakan dengan bulan yang berbeda di tahun yang sama. Jumlah keseluruhan pendatang sebesar 320 KK.

Gambaran lain tentang Sota adalah adanya pos tentara yang menjaga garis perbatasan. Di sana tinggal kurang lebih 30 tentara organik yang bertugas selama 6 bulan. Setiap enam bulan sekali terjadi pergantian kelompok tentara. Mereka berasrama di dekat tugu perbatasan. Setiap kali tamu yang datang untuk mengunjungi tugu perbatasan, mereka diwajibkan lapor dan menitipkan kartu identitas.

Memasuki distrik Sota, terdapat beberapa gundukan tanah menjulang antara 1 – 3 meter, orang di sana sering menyebut sebagai Musamus, yaitu rumah semut. Gundukan-gundukan itu akan terlihat beberapa kali di sepanjang jalan menuju Distrik Sota, bahkan di kebun-kebun banyak sekali Musamus yang tumbuh ibarat jamur kayu. Musamus juga telah dijadikan sebagai suatu simbol nilai positif oleh masyarakat di sana, yaitu lihatlah karya, jangan melihat bagaimana kami membuat. Konon, Musamus itu hanya ada di Merauke, tidak ada di kota lain. Hal ini menandai bahwa Musamus merupakan salah satu ciri daerah Merauke.

Distrik Sota terdiri dari 5 kampung yaitu Kampung Sota, Kampung Turai, Kampung Erambo, Kampung Janggadur, dan Kampung Rawabiru. Pusat administrasi berada di Kampung Sota. Beberapa perkantoran ada di sana seperti Kantor Distrik Sota, Kantor Kepolisian Sektor, Pusat Kesehatan Masyarakat,

Pos Tentara Penjaga Perbatasan, Kantor Imigrasi, lembaga-lembaga pendidikan, depot bahan bakar minyak (Pertamina), masjid dan gereja. Untuk ukuran kecamatan, infrastruktur tersebut sudah cukup lengkap, namun distrik ini belum dilengkapi pasar rakyat. Konon pernah ada gagasan untuk mendirikan pasar di sana, tetapi hingga sekarang belum terwujud. Alasannya karena tanah yang sedianya akan dibangun pasar masih dipermasalahkan oleh suku yang merasa punya tanah ulayat.

Mata pencaharian penduduk kebanyakan adalah petani, sebagaimana daerah transmigran lainnya yang mengandalkan pertanian atau perkebunan. Sistem pertanian di sana mengandalkan model pertanian tadah hujan. Selain padi mereka juga menanam sayur mayur dan buah-buahan. Jual beli kebutuhan harian dilayani dengan beberapa penduduk yang membuka kios di rumahnya masing-masing, di samping adanya beberapa pedagang eceran yang menawarkan barang dengan naik sepeda.

Hubungan sosial masyarakat Sota diikat dalam semboyan Kabupaten Merauke: "Izakod Bikai Izakod Kai" (Satu hati satu tujuan), artinya yaitu satu hati untuk sama-sama mencapai kemajuan. Semboyan Merauke juga sering disebut sebagai Istana Damai. Semboyan ini nampaknya menuntut warga untuk mengedepankan kedamaian. Peneliti menyaksikan relasi masyarakat pendatang dengan putera daerah terlihat saling sapa dan ramah satu sama lain. Namun demikian, dari beberapa wawancara yang kami lakukan, ada kesan bahwa dalam beberapa hal masyarakat adat masih memegang peranan penting dan dominan dalam masalah penggunaan sebuah lokasi. Setiap pembebasan tanah harus dikuti ganti rugi dengan pemimpin adat. Sekalipun secara administrasi negara sebuah tanah sudah bersertifikat, namun apabila belum

diikuti pembayaran adat, maka seseorang belum bebas menggunakan tanah yang dibelinya. Bahkan dalam beberapa hal, dalam pembangunan prasarana tertentu yang diinisiasi pemerintah terkadang masih terkendala adanya pihak adat yang masih memperlumahkan status tanah. Beberapa rencana pemerintah membangun fasilitas umum seperti rencana pembangunan pasar, rumah sakit bisa gagal karena urusan tanah tidak kunjung selesai. Di tanah Papua, masih terdapat ketentuan yang setiap persoalan pemilikan dan penggunaan tanah harus diikuti penyelesaian adat.

Layanan Agama dan Keagamaan

Kabupaten Merauke terbagi dalam 20 Kecamatan. Menurut Martinus, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke, dengan jumlah kecamatan sebanyak itu, Kabupaten Merauke hanya mempunyai 3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang fungsional. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang harus dikerjakan seorang pegawai pencatat nikah (PPN) KUA untuk melayani wilayah kerja seluas itu. Sebenarnya mereka sudah mengusulkan penambahan dua KUA, namun hingga saat ini izin operasional kedua KUA belum keluar (Wawancara dengan Martinus, Kepala Kemenag Kabupaten Merauke, 26 Juli 2012).

Di samping minimnya jumlah KUA, terdapat realitas lain sebagaimana pernah diekspos *Tribun Pontianak* (12/12/2011) tentang Merauke sebagai daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Propinsi Papua. Setiap tahun Pengadilan Agama Merauke menyidangkan rata-rata sekitar 200 kasus perceraian. Ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga melalui bimbingan keagamaan dapat diduga masih rendah. Secara ideal, semua agama menganjurkan pernikahan dan memelihara pernikahan itu selama-lamanya. Sidiq, mantan

Ketua PA Merauke yang pindah tugas sebagai Ketua PA Parepare, Sulawesi Selatan, menjelaskan penyebab gugatan perceraian di Merauke antara lain suami tidak bertanggung jawab, telah berpisah dua tahun berturut-turut, dan sering terjadi percekocokan antara suami-istri (Lihat, <http://pontianak.tribunnews.com/2011/12/12/perceraian-di-merauke-tertinggi-di-papua>, Diakses, 22 Oktober 2014)

Dari aspek agama, masyarakat Distrik Sota terbagi dalam tiga pemeluk agama besar, yaitu Katolik, Islam, dan Kristen. Jumlah umat masing-masing agama adalah 210 orang (Katolik), 987 orang (Islam), dan 854 orang (Kristen). Untuk tempat ibadah, di Distrik Sota terdapat 3 masjid, 2 mushola, 9 gereja (Gereja Katolik, Gereja Protestan, Gereja Pantekosta dan Gereja Advent). Sedangkan dalam hal kegiatan keagamaan yang peneliti amati di Sota, Merauke dari kegiatan keagamaan yang dilakukan di kalangan Muslim, Kristen dan Katolik, tampak bahwa mereka menjalankan pendidikan keagamaan dengan tradisinya masing-masing. Di Islam ada majelis taklim, kegiatan kemasjidan, sedangkan di Kristen dan Katolik ada sekolah minggu, ibadah keluarga, pertemuan remaja. Kehidupan keagamaan nampaknya masih berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkesan adanya sedikit kompetisi terselubung.

Di lingkungan Kristiani, baik Katolik maupun Protestan terdapat empat gereja aktif, yakni 1 Gereja Katolik dan 3 Gereja Kristen yaitu Gereja Protestan, Gereja Advent, Gereja Pantekosta, dan Gereja Advent. Masing-masing gereja dibina oleh satu orang pendeta. Di kalangan Kristiani, mereka mempunyai beberapa kegiatan keagamaan, seperti sekolah minggu, ibadah keluarga yang bergiliran dari rumah ke rumah, pertemuan remaja, sembahyang ibu-ibu setiap hari Minggu, sembahyang bapak-bapak setiap Minggu sore.

Dalam hal pembinaan, agama Katolik cukup berhasil membina masyarakat putera daerah. Ini tergambar dari pengakuan Yanuarius Makonama (Pengurus Gereja Protestan) kurang lebih anggota jamaah gereja 70% putera daerah, sementara pendatang 30%. Meskipun untuk Merauke, jumlah Jamaah Katolik lebih banyak dari pada umat Kristen. Konon untuk daerah selatan Papua, yaitu Merauke, dominasi agama Katolik lebih besar dibandingkan dengan Papua Utara yang lebih banyak Kristen Protestan (Wawancara dengan Yanuarius Makonama, Pengurus Gereja Protestan, 27 Juli 2012).

Di kalangan Muslim ada dua kelompok jamaah majelis taklim yang aktif yaitu Majelis Taklim Al-Hidayah dan Majelis Taklim Muslimat. Selain itu ada satu majelis taklim bapak-bapak, namun tidak begitu aktif. Satu-satunya organisasi keagamaan yang aktif adalah keberadaan Pengurus Kesejahteraan Masjid (PKM). PKM berpusat di Masjid Nurul Huda yang berlokasi Jalan Trans Irian-Sota. Masjid ini mempunyai halaman yang cukup luas. Di lokasi yang sama Madrasah Ibtidaiyah As-Sunnah Al-Maarif beroperasi. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Muslim di sana. Bahkan konon pengurus ingin menjadikan tempat itu menjadi semacam Islamic Center di Sota. Cita-cita itu diwujudkan dengan mendirikan PAUD dan madrasah Ibtidaiyah di lokasi yang sama.

Di lingkungan Islam, organisasi keagamaan yang bergerak paling awal dari majelis taklim adalah Majelis Taklim Al-Hidayah, yang notabene berafiliasi kepada kekuatan Golkar di era orde baru. Namun belakangan, kiprah Al-Hidayah mulai digantikan oleh Majelis Taklim Jamaah Muslimat dengan inisiatifnya mendirikan lembaga pendidikan PAUD dan Madrasah Ibtidaiyah. Kedatangan transmigran yang kebanyakan berasal

dari Jawa Timur menyebabkan organisasi dan tradisi NU lebih berkembang. Majelis Taklim Al-Hidayah beranggotakan 25 orang dengan jadwal pengajian setiap hari jumat, sedang yang muslimat beranggotakan 15 orang dengan hari pertemuan setiap hari Minggu.

Adanya beberapa institusi keagamaan di Distrik Sota, belum menjamin adanya penguatan religiusitas masyarakat. Keberhasilan pendidikan keagamaan masih minim, religiusitas masyarakat masih rendah. Menurut salah satu warga yang kebetulan PNS yang tidak mau disebut namanya, pendidikan keagamaan di Distrik Sota kurang berkembang. Ini bisa dilihat dari indikator sholat Jumat. Sholat Jumat sering hanya berisi 14 orang. Meskipun jumlah itu tidak memenuhi jumlah minimal 40 orang, namun sholat jumat tetap diselenggarakan. Menurutnya, ini terjadi karena beberapa faktor yakni: 1). Kurangnya pendidikan agama; 2). Tenaga penyuluh atau agamawan di daerah ini sangat kurang; 3). Kurangnya guru agama di sekolah formal (Wawancara dengan informan [tidak mau disebut nama], 27 Juli 2012).

Fenomena kurangnya tenaga penyuluh keagamaan di Distrik Sota ini menyebabkan salah satu warga transmigran yang kebetulan lulusan PGA di Jawa Timur bernama ibu Fathonah merasa terpanggil untuk menyelamatkan keadaan. Dengan ilmu agama yang diakuinya sangat terbatas maka dia mempertaruhkan dirinya untuk mengajar mata pelajaran agama di sekolah formal dan mengajar agama di rumah serta merintis berbagai aktifitas keagamaan (Wawancara dengan ibu Fathonah, 28 Juli 2012).

Untuk layanan pendidikan agama di sekolah, pada jenjang PAUD, awalnya karena PAUD yang ada hanyalah PAUD Mentari yang dilaksanakan oleh Yayasan Kristen, maka otomatis

layanan pendidikan agama yang ada adalah layanan pendidikan agama Kristen. Menyadari kenyataan itu ibu Fathonah pada tahun 2007 tergerak untuk mendirikan PAUD yang diberi nama PAUD Al-Firdaus. Dengan adanya PAUD Al-Firdaus barulah layanan pendidikan agama Islam untuk anak-anak mulai terlayani. Sedangkan untuk lembaga pendidikan formal di daerah sota secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut: ada dua lembaga pendidikan setingkat PAUD yaitu PAUD Mentari dan PAUD Al-Firdaus. Untuk Sekolah dasar, ada dua, yaitu SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan MI Al-Maarif dan di jenjang Sekolah Menengah Pertama terdapat SMP Negeri 11 Merauke. Sedangkan di jenjang menengah atas terdapat 1 sekolah yaitu SMKN 1 Sota.

Untuk jenjang di sekolah Dasar, khususnya di SD YPK Sota Merauke yang berdiri 1975, dari informasi yang berhasil diperoleh, layanan pendidikan agama hanya disediakan guru agama Kristen. Sementara untuk siswa Katolik dan Islam belum disediakan guru yang seagama dengan agama murid. Namun, berdasarkan survei peneliti ke lokasi, ternyata guru agama Kristen pun waktu itu juga tidak ada atau belum ada guru agama Kristen yang tetap. Tidak adanya layanan pendidikan agama sesuai dengan agama siswa inilah nantinya menjadi salah satu alasan kenapa Madrasah Ibtidaiyah di Sota Merauke didirikan.

Namun begitu, berdasarkan wawancara dengan ibu Rosina Rosalia Luhulima (PLT Kepala Sekolah), kelengkapan sumber belajar agama di SD ini cukup tersedia, yaitu adanya 20 eksemplar al Kitab (Wawancara dengan ibu Rosina Rosalia Luhulima (PLT Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen), 27 Juli 2012). Kondisi ini sudah lebih baik, mengingat di madrasah yang ada di Sota malah belum mempunyai Mushaf al-Quran yang memadai.

Adapun pendidikan agama di SD YPK diarahkan untuk memahami keyakinan dan sikap Kekristenan, sesuai dengan misi Yayasan Pendidikan Kristen. Sedangkan untuk jenjang SMP, berdasarkan survei peneliti ke lokasi SMP Negeri 11 Merauke, ditemukan bahwa di sana telah disediakan guru agama. Sekolah ini berdiri 1997. Jumlah guru agama yang PNS yakni 1 orang Katolik, 1 Protestan; Islam (honorar). Jumlah murid kurang lebih 95 anak. Jumlah murid yang Muslim 45% dari total siswa. Kelas VII jumlah siswa yang beragama Islam sebanyak 24 anak, sedang di kelas VIII terdapat tujuh anak dan di kelas IX terdapat 10 anak. Kalau diperbandingkan dengan siswa yang beragama lain, maka siswa yang beragama Islam di jenjang SMP menempati jumlah yang tertinggi, mengingat jumlah siswanya terbagi dalam dua agama, yaitu Katolik dan Kristen. Namun demikian, justru layanan pendidikan agama Islam belum didukung guru tetap sebagaimana dua guru agama yang lain yang telah berstatus sebagai PNS.

Beberapa prasarana pendidikan Islam sebenarnya telah tersedia seperti yang dimiliki SMP seperti adanya mushola. Namun, nampak jelas pendidikan agama belum maksimal. Ini ditandai dengan belum optimalnya penggunaan mushola sebagai tempat ibadah. Mushola terkesan kurang terawat, kaca mushola pecah dan belum diganti. Ibu Fathonah, sekali lagi selain menjadi pengajar PAUD juga menjadi guru agama di sana, dan beliau menceritakan perihal masih terbatasnya pendidikan agama Islam di sana. Mengajari anak-anak mengaji merupakan pekerjaan tersendiri, mengingat banyak anak SMP yang belum mengenal huruf *hijaiyah*.

Dari sekian puluh jumlah siswa yang beragama Islam, ada satu anak memakai jilbab. Penggunaan jilbab di sana, dahulu pernah dipersoalkan,

dan ketika ada seorang anak yang memakai jilbab, berdasarkan hasil rapat guru, sekolah pernah mau melarang penggunaan jilbab dengan alasan masyarakat belum siap. Mengetahui akan dilarang, si siswa dengan dukungan orang tua mengancam akan memindahkan anak tersebut ke kota. Mendapat desakan seperti itu, sekolah akhirnya tidak berani melarang, khawatir dituduh melakukan pembatasan kebebasan beragama. Ternyata kekhawatiran masyarakat belum siap itu tidak terbukti, ternyata setelah si siswa dibiarkan berjilbab, tidak ada reaksi apapun dari masyarakat terhadap siswa tersebut.

Untuk jenjang SMA, pendidikan agama di sekolah tidak banyak berbeda dengan SMP. Guru agama yang belum semuanya PNS, menyebabkan kesan pendidikan agama sepertinya belum mendapatkan perhatian yang memadai. Persoalannya hampir sama dengan di SMP yakni tenaga pendidik yang terbatas, prasarana yang belum lengkap, bahkan di SMK belum ada mushola sebagaimana halnya di SMP, jumlah kitab suci al-Quran yang terbatas, dan buku-buku bacaan agama yang kurang memadai. Sedangkan untuk madrasah, di Distrik Sota hanya ada satu madrasah, itupun masih dalam status rintisan yaitu Madrasah Ibtidaiyah As-Sunah Al-Maarif II (Kelas jauh dari MI Al-Maarif I yang berada di Merauke). Madrasah ini baru dibuka pada tahun 2009 dan baru memiliki kelas I hingga kelas IV. Jumlah murid keseluruhan adalah 35 siswa. Jumlah guru yang mengajar di MI sebanyak 4 orang. Cerita awal berdirinya MI ini adalah didirikan sebagai kelanjutan dari pendirian PAUD sebelumnya yang telah melahirkan lulusan sehingga untuk mewadahi lulusan PAUD, didirikanlah Madrasah Ibtidaiyah.

Selanjutnya, layanan pendidikan agama di SD YPK masih terbatas, yaitu hanya disediakan guru agama Kristen, sementara untuk siswa Muslim dan

Katolik tidak disediakan guru khusus yang seagama dengan mereka. Konon, dahulu pernah dikirimkan guru agama Islam, tetapi tidak diterima oleh pihak yayasan. Prihatin atas pendidikan agama yang kurang terlayani, serta adanya sinyal lemah bahwa anak lulusan Al-Firdaus tidak diterima di SD YPK, maka ibu Fathonah dan kawan-kawan menggagas pendirian pendidikan Madrasah. Langkah pertama yang dilakukan ibu Fathonah adalah mencari lembaga pendidikan madrasah yang terdapat di Kota Merauke dan menemukan Madrasah Ibtidaiyah Al-Maarif. Kemudian ia memutuskan membuka kelas jauh dari MI Al-Maarif.

Kerukunan Umat Beragama

Sekilas masing-masing pemeluk agama di Distrik Sota leluasa dalam menjalankan ibadah. Setiap waktu sholat, masjid paling besar di tempat itu selalu mengumandangkan adzan dengan menggunakan pengeras suara dan jemaah masjid leluasa melakukan puji-pujian, dan tadarus. Demikian pula lonceng dari gereja leluasa berbunyi sesuai dengan jadwal peribadatan umat Kristiani. Bebasnya menggunakan pengeras suara, menurut peneliti merupakan sebuah gambaran tersendiri betapa luasnya relasi antar agama yang terjadi di sana. Namun di sisi lain, penulis masih merasakan adanya hubungan agama yang belum tuntas. Masyarakat terkesan masih terbelah antara pendatang dan penduduk pribumi. Orang pribumi identik dengan agama Katolik atau Kristen, sedang pendatang kebanyakan (pegawai, pedagang, transmigran) adalah Muslim. Hal ini sedikit banyak sering menimbulkan gesekan kecil yang perlu diantisipasi. Safiudin (2011) menyebutkan kebijakan transmigrasi oleh pemerintah pusat sering dituding oleh penduduk asli yang beragama Kristen sebagai misi Islamisasi secara terselubung dan sistematis.

Sebagai contoh, Pendirian Madrasah As-Sunah Al-Maarif II di Sota, satu-satunya madrasah di tempat itu, bukan tanpa masalah. Ada beberapa pihak yang sebenarnya masih keberatan dengan kehadiran madrasah ini. Terutama pihak SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) yang sebelumnya adalah satu-satunya SD di Distrik Sota. Saat itu sebenarnya sudah ada desakan apabila sebaiknya SD YPK dinegerikan, namun pihak YPK masih keberatan. Semula umat Islam beranggapan bahwa mendirikan SD umum akan lebih bermasalah karena itu bahasa terang-terangan untuk menyaingi SD YPK. Namun dengan mendirikan madrasah, para pendiri madrasah beranggapan bahwa madrasah lebih aman, karena didirikan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk pendidikan agama anak mereka beranggapan karena kebutuhan pendidikan siswa Islam tidak terpenuhi, ditambah siswa Al-Firdaus tidak diterima di SD YPK mendorong ibu Fathonah dan teman-temannya bertekad mendirikan madrasah. Jelaslah dari sisi masyarakat Muslim, faktor pendorong didirikannya MI As-Sunah Al-Maarif adalah untuk mewadahi pendidikan untuk anak umat Islam.

Hingga penelitian ini diadakan, perjalanan lembaga pendidikan madrasah ini telah berjalan memasuki tahun keempat. Sejauh ini murid setiap kelasnya terus terisi. Hanya saja masalah tempat berlangsungnya pendidikan masih menumpang ke gedung PAUD Al-Firdaus. Ruang kelas yang hanya dua, akhirnya dibagi masing-masing menjadi 2 kelas, total menjadi 4 kelas. Karena masih menumpang, otomatis madrasah ini belum mempunyai kekayaan sendiri, semuanya masih satu kepemilikan yaitu sarana prasarana PAUD Al-Firdaus.

Sekalipun terbatas, anak-anak sangat antusias mengikuti pendidikan. Guru-guru yang mengajar berjumlah empat orang, yaitu: Fathonah, Sri

Astuti, Jamilah dan Kusnaeni. Dengan menggunakan papan tulis kapur, pelajaran demi pelajaran dapat dilaksanakan. Peneliti melihat ada salah satu muridnya adalah berwajah putera daerah Papua yang berkulit hitam. Konon orang tua angkat anak tersebut sebenarnya masih Kristen, namun mereka tidak keberatan anaknya sekolah di madrasah. Pihak pengelola juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan merasa senang berarti mereka bisa melayani pendidikan untuk semua.

Oleh karena itu, pada tahun 2009 dibuka kelas I MI dengan murid sebanyak 5 anak. Sebenarnya masih ada beberapa bagian masyarakat yang masih keberatan dengan keberadaan MI ini, misalnya posisi madrasah yang menggeser jumlah siswa SD yang ada. Namun, menurut pengelola, hal ini dilakukan karena kepentingan menyelamatkan peserta didik dari kebutaan terhadap agama. Seiring waktu, masa depan madrasah ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama, terutama di masalah izin operasional dan kelengkapan sarana yang memadai. Semangat warga yang ingin menyelenggarakan pendidikan untuk anak mereka pantas diapresiasi. Belajar dari kasus madrasah di Sota, ternyata pendidikan madrasah sangat dibutuhkan untuk lokasi perbatasan. Hal ini mengingat tidak adanya sekolah dasar yang netral dari kepentingan agama kelompok tertentu. Menurut pelaku madrasah di Sota, seandainya di sekolah dasar telah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama siswa, maka mereka tidak susah-susah harus mendirikan madrasah. Sementara kalau mendirikan SD umum dianggap lebih beresiko karena dianggap menggeser lembaga pendidikan dasar yang telah ada.

Permasalahan lain yang menghantui terkait kerukunan agama adalah pengelompokan sosial atas nama agama.

Penduduk lokal identik dengan Katolik atau Kristen, sedangkan pendatang adalah Islam. Waimbo dan Yuwono menyebutkan klasifikasi pendatang dengan sebutan "Amber", dan penduduk lokal atau pribumi sebagai "Komen." (Yuwono, 2012). Pengelompokan sosial ini bisa berbahaya bila salah satu kelompok kemudian bisa lebih maju dari pada yang lain. Pendatang yang kebetulan adalah para transmigran dari Jawa biasanya mempunyai keuletan dalam bekerja untuk menyambung hidup di daerah itu. Lama-lama secara sosial ekonomi, para pendatang banyak lebih berhasil hidupnya dibandingkan penduduk lokal.

Melihat kenyataan ini, Pemerintah Daerah Merauke melihat para transmigran mempunyai sawah atau ladang untuk bercocok tanam dan rumah dalam tanah kavling, mengambil inisiatif untuk membuat rumah kavling yang diperuntukkan untuk penduduk lokal. Terobosan ini bukan tanpa masalah, karena dengan memberikan penduduk fasilitas sebagaimana yang didapatkan para transmigran ternyata justru membuat penduduk lokal termanjakan. Tanpa kerja keras mereka toh bisa menikmati rumah kavling, sementara mental bekerja di kalangan penduduk lokal belum terbangun. Ini mungkin kerugian yang dimiliki oleh penduduk lokal.

Kerugian yang dirasakan oleh pendatang juga ada. Di kalangan muda pendatang muncul pemahaman kalau mau maju harus keluar dari daerah itu misalnya mereka melanjutkan pendidikan ke kota atau ke Jawa, Sulawesi dan daerah lainnya. Kerawanan yang disebabkan adanya kesenjangan yang makin menganga antara kelompok pendatang dan penduduk lokal, menyebabkan para anak muda memilih pergi dari daerah situ untuk belajar atau memperbaiki nasib yang lebih baik. Ketika mereka menjadi sarjana, kebanyakan mereka enggan untuk kembali ke daerah itu. Alih-alih dari pada memperkeruh suasana lebih

baik mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain.

Barangkali kita bisa berandai-andai, seandainya saja ada penduduk pribumi yang menjadi mualaf dan bersedia masuk Islam, mungkin rasa cemburu yang menimbulkan kontra produktif dari berbagai sisi itu tidak perlu terjadi. Tidak dipungkiri, memang ada satu dua orang lokal menikah dengan pendatang, namun biasanya yang melakukan atau berani menikah dengan pendatang ini adalah mereka yang secara agama memang tidak kuat. Akibatnya ketika masuk Islam, mereka juga termasuk orang yang kurang taat beragama. Agama ya sekadar agama. Jadi berharap kepada mereka untuk melakukan perbaikan keadaan pun seperti pepatah jauh panggang dari api, artinya tidak bisa berharap kepada orang-orang tersebut.

Namun, apapun kenyataannya, perencanaan terkait perkembangan keagamaan perlu dilakukan. Bukan sebaliknya, muncul anggapan orang dari pada penguatan agama berimplikasi pada kerawanan sosial, maka sebaiknya penguatan agama melalui pendidikan tidak perlu dilakukan. Mungkin ada sebagian pejabat daerah yang berpandangan seperti itu, sehingga pendidikan agama menjadi tidak prioritas. Namun mengingat agama adalah persoalan pribadi yang bisa jadi dinamis, maka sekali lagi perekayaasaan terkait kehidupan keagamaan perlu terus dilakukan seiring dengan usaha pembangunan daerah yang melibatkan spirit keagamaan sebagai potensi pendorongnya.

Sejauh ini potensi kerusuhan antar agama di Distrik Sota Merauke memang tidak sampai meledak menjadi kerusuhan sosial. Hal itu bisa jadi karena secara kebetulan di Distrik Sota terdapat pos tentara yang cukup kuat, sehingga riak sekecil apapun di masyarakat akan dengan mudah ditangani. Mengandalkan kekuatan militer dalam pendewasaan

masyarakat beragama tentu kurang tepat, sehingga model pendidikan agama yang mendorong pada kedewasaan dalam berelasi dengan umat beragama lainlah yang perlu terus dipupuk.

Ketika penelitian ini berlangsung, forum lintas agama seperti Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang merupakan amanat PBM belum terbentuk. Peran-peran terkait komunikasi antar agama selama ini dimediasi oleh pemerintah. Hanya saja ketika pemerintah didominasi penduduk lokal yang notabene agamanya relatif homogen dan berbeda dengan agama kelompok pendatang, menjadikan mediasi yang dilakukan kurang maksimal. Pendatang harus lebih banyak mengalah dan menyadari bahwa mereka hanya pendatang. Suatu perasaan yang tidak positif untuk kelancaran pembangunan daerah.

Profil Guru Agama di Perbatasan

Minimnya agamawan di daerah perbatasan telah mendorong seorang ibu dari warga transmigran untuk berpartisipasi dalam layanan keagamaan. Dengan ilmu agama yang terbatas, ibu Fathonah dipaksa oleh keadaan untuk menjadi guru agama di daerah perbatasan negara. Nama ibu Fathonah peneliti temukan setelah wawancara dengan berbagai informan yang berhasil peneliti temui. Peneliti menyimpulkan bahwa Ibu Fathonah ini merupakan sosok penting dalam pelayanan agama dan keagamaan di daerah Sota Merauke. Ibu Fathonah kelahiran Jember, 1958. Ia menikah pada tahun 1981 dengan bapak Sulaiman kelahiran Sumenep 1949. Mereka tinggal di Balong, Jember, Jawa Timur. Tahun 1995 ibu Fathonah dan keluarga memutuskan bertransmigrasi karena ingin mengubah nasib. Waktu berangkat ke Merauke, ibu Fathonah sudah mempunyai 5 anak, dan anaknya bertambah satu selama berada di Sota, Merauke.

Ibu Fathonah lulusan dari sekolah PGAN (lulus 1977) di Balong Jember. Peran penting ibu Fathonah selain menjadi pimpinan Majelis Taklim Muslimat Distrik Sota, ia juga pendiri PAUD Al-Firdaus dan Kepala MI Al-Maarif Sota. Ibu Fathonah juga mengajar agama di SMP Negeri 11 Sota Merauke. Terpanggil oleh karena minimnya pelajaran agama untuk anak-anak, ibu Fathonah juga mengajarkan les bimbingan agama di rumahnya, yaitu dengan membuka Taman Pendidikan al-Quran (TPA) di rumahnya setiap sore hari. Berkali-kali dalam wawancara dengan peneliti, ibu Fathonah mengeluhkan tentang pelajaran agama pada anak-anak Sota. Ia nampak merasa sendirian dalam mencoba memberikan pelajaran agama semaksimal mungkin pada anak-anak. Ia juga merasa prihatin perihal masih rendahnya kemampuan baca al-Quran pada siswa SMP Negeri Sota. Kemampuan baca mereka masih di bawah kemampuan anak-anak madrasah yang dipimpinnya. Ia juga mencemaskan pembelajaran agama di Sota di masa depan. Di Sota sangat sedikit orang yang bisa mengajarkan agama, bahkan bisa dibilang tidak ada. Sementara untuk mengandalkan anak-anak yang belajar ke kota untuk kembali ke Sota, kemungkinan itu sangat kecil, karena tidak mustahil anak-anak Sota sekarang yang belajar ke pesantren di kota atau daerah lain nantinya tidak ingin kembali ke Sota.

Terpanggil oleh semua keadaan keagamaan di Sota ini, ibu Fathonah berniat mewakafkan sebagian tanahnya untuk kepentingan agama. Ia sedang mengurus sertifikasi tanah wakaf sebanyak 2500 m². Tanah ini nantinya disediakan untuk pembangunan madrasah, atau lebih jauh lagi pesantren. Ia merasa terpanggil untuk wakaf, karena di lokasi penyelenggaraan madrasah ini sering masih dipermasalahakan oleh orang adat tentang peruntukannya. Mengingat tanah tempat Masjid Nurul Huda berdiri adalah tanah fasos yang disediakan

oleh dinas transmigrasi yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan masjid. Dengan tanah wakaf yang ibu Fathonah ingin lakukan, menurutnya tindakan ini dapat meminimalkan potensi konflik yang terjadi di sana.

Dengan dibantu suaminya, ibu Fathonah menjalani hidup sehari-hari di Sota dengan penuh pengabdian di bidang agama. Selain mengelola tanah kapling jatah bagian dari transmigrasi, ibu Fathonah beserta suami membuka kios di rumahnya. Di samping itu juga memproduksi tempe kedelai sebagai tambahan usaha. Pagi-pagi ibu Fathonah pergi mengajar di Madrasah, sore hari mengajar mengaji TPA di rumahnya. Karena-anak-anaknya yang berjumlah 6 orang sudah ke kota semua, maka ibu Fathonah mempunyai waktu yang banyak untuk melayani pendidikan agama setiap harinya.

Pembahasan

Dari deskripsi data di atas, secara umum bisa dikatakan bahwa layanan agama dan penciptaan kerukunan agama di Distrik Sota Merauke belum optimal. Di bidang layanan agama, keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) menjadi masalah yang paling mendasar. Tidak adanya SDM yang memadai menjadi penyebab kehidupan agama hanya mengalir apa adanya. Bisa diduga bahwa kesadaran agama masih terkesan permukaan, sebatas menjalankan ritual dan aspek kesalehan tingkat dasar. Agama belum maksimal menjadi subyek pendorong kemajuan dan belum menjadi inspirasi pembangunan yang bisa menguntungkan semua pihak. Justeru sebaliknya, keadaan ini menyimpan kerawanan apabila agama menjadi sumber prasangka, kecemburuan dan mendorong potensi konflik antar kelompok masyarakat.

Secara formal, layanan agama secara administratif sejauh ini memang sudah bisa dilayani. Meskipun pelayanan itu masih jauh dari proporsional. Dari 20 kecamatan yang ada di Merauke, pelayanan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dilayani oleh 3 unit KUA. Bisa dibayangkan bahwa betapa berat pelaksanaan pernikahan yang dilayani oleh pegawai ketiga KUA. Berdasarkan informasi yang diterima dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Merauke, saat ini jumlah kaum Muslimin di Merauke lebih dari sepertiga jumlah penduduk keseluruhan yakni berjumlah 83.110 kaum Muslimin (*Suara Hidayatullah*, Mei 2000).

Masih terbatasnya layanan agama juga terlihat dalam layanan pendidikan agama. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pendidikan agama di sekolah berdasarkan pengamatan serta beberapa wawancara yang peneliti lakukan dapat di antaranya adalah: 1). tidak semua sekolah di Sota Merauke melayani pendidikan agama sesuai dengan agama siswa; 2). terbatasnya guru agama yang tersedia di daerah perbatasan negara; 3). rendahnya pendidikan agama anak menyebabkan mereka harus diajari agama dari nol pada jenjang pendidikan yang semestinya lebih tinggi seperti SMP dan SMK 4). akibat minimnya pendidikan agama menyebabkan sarana-prasarana keagamaan seperti mushola dan perpustakaan agama kurang atau nyaris tidak berfungsi.

Hal yang sama terjadi pada lembaga pendidikan formal madrasah. Institusi madrasah belum sepenuhnya diterima masyarakat, karena dianggap pesaing bagi lembaga pendidikan sebelumnya. Banyak permasalahan yang dihadapi penyelenggara madrasah di Distrik Sota Merauke. Menurut pengakuan salah satu guru madrasah, masalah-masalah yang dihadapi madrasah antara lain: 1).

masyarakat putra daerah, yang kebetulan beda agama, belum sepenuhnya menerima kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan; 2). sarana prasarana pendidikan yang dimiliki madrasah terbatas; 3). kompetensi SDM madrasah terbatas; 4). sumber pembiayaan pendidikan di madrasah terbatas; 5). ada sebagian orang tua siswa yang belum aktif beribadah, sehingga ketika melakukan pembiasaan siswa terhambat karena orang tua belum aktif beribadah; 6) lokasi tanah untuk pembangunan gedung madrasah sering dipermasalahkan oleh adat dan perlu pembebasan secara adat.

Permasalahan keagamaan di daerah perbatasan tidak saja sebatas keharusan layanan agama yang harus diberikan pemerintah kepada umat beragama, tetapi juga masalah kerukunan antar umat beragama. Adanya dikotomi "Amber" (pendatang) dan "Komen" (penduduk lokal) yang secara kebetulan beda agama menjadi satu permasalahan kerukunan tersendiri di Distrik Sota. Sekalipun sejauh ini konflik antar agama belum pernah terjadi hingga ke konflik horisontal, namun adanya jarak sosial yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi akan mempunyai potensi kerawanan terhadap kerukunan beragama. Untuk itu, di Distrik Sota diperlukan usaha perencanaan sosial yang mengarahkan masyarakat untuk hidup lebih inklusif.

Usaha-usaha untuk menciptakan kerukunan umat beragama seperti membiasakan gotong royong antar iman, forum-forum yang memberikan kesempatan untuk membuat komunikasi yang lebih intens antar umat beragama mutlak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pemimpin-pemimpin agama lokal akan kebutuhan dasar seperti itu. Sayangnya, keterbatasan agamawan di Distrik Sota menjadi salah satu hal mendasar di daerah itu. Idealitas suasana kerukunan antar agama dan

tidak ketersediaan SDM yang seharusnya menjadi pilar terciptanya suasana ideal, menjadi sebab masyarakat rentan terhadap kemungkinan provokasi. Di sinilah dibutuhkan kehadiran layanan agama dari pemerintah yang memberikan kesadaran baru bahwa agama hendaknya dapat menjadi sumber kebersamaan sosial di daerah perbatasan negara dan bukan sumber konflik.

Penutup

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus Distrik Sota Merauke untuk melihat layanan agama dan kerukunan agama di daerah perbatasan negara antara lain: *Pertama*, pelayanan agama yang diberikan pemerintah di daerah perbatasan negara masih rendah dan perlu penguatan. *Kedua*, SDM agamawan daerah perbatasan sangat minim, bahkan terkadang tidak ada, sehingga memaksa orang yang secara ilmu agama kurang kompeten berperan menjadi guru agama. *Ketiga*, kerukunan antar umat beragama di daerah perbatasan belum terkelola sedemikian rupa, sehingga hal itu menjadi potensi kerawanan sosial bila tidak terantisipasi dengan baik. *Keempat*, penguatan layanan agama oleh pemerintah di daerah-daerah perbatasan negara sudah mendesak untuk dilakukan.

Sebagai jalan keluar, untuk mengoptimalkan peran agama dalam pembangunan daerah perbatasan negara peneliti mengusulkan agar Kementerian Agama RI menghidupkan forum-forum kerukunan seperti FKUB di daerah-daerah perbatasan. Usaha ini untuk menjawab minimnya aktifitas bersama baik antar umat beragama maupun antara warga pendatang dan warga lokal. Selain itu, untuk mengisi kekosongan agamawan di daerah perbatasan negara perlu diisi oleh pemerintah dengan mengirim penyuluh keagamaan yang

menguasai agama sekaligus sadar kerukunan. Syarat itu mutlak diperlukan agar jangan sampai terjadi usaha penguatan agama justru menimbulkan konflik baru. Penguatan layanan agama harus paralel dengan usaha menciptakan

relasi kerukunan baru. Mengingat tidak mudah mengirimkan tenaga penyuluh di daerah perbatasan, maka pengiriman bisa dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu secara berkenambungan.

Daftar Pustaka

- As'ad, Muh., dkk. *Biografi Tokoh Agama di Kawasan Timur Indonesia*. Makasar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama,
- Hadi, S. *Peranan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Perbatasan*. Makalah Workshop Nasional Pertahanan Kawasan Perbatasan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1-2 November 2011.
- Murtadho, M. "Izakod Bekai Izakod Kai: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Ujung Merauke (Distrik Sota Kab. Merauke)" dalam *Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan di Perbatasan Negara*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan agama dan keagamaan, 2012.
- Romanus dan Sunarjo. *Sekilas Tentang Kabupaten Merauke*. Lihat <http://ramonus-sunarjo.blogspot.com/p/normal-0-false-false-false.html>, Diakses, 17 Oktober 2014.
- Safiudin, "Analisis Peran Majelis Muslim Papua (MMP) dalam Membina Kerukunan Antara Islam-Kristen di Kota Jayapura," yang dipresentasikan dalam *The 11th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, di Bangka Belitung, 10-13/10/2011.
- Sumule, Agus. "hak-hak Rakyat Papua Atas Sumber Daya Alam dan Peranan Mereka dalam Perekonomian modern dalam Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat", dalam Theodor Rathgeber (ed). *Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Papua Barat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Waimbo dan Yuwono. "Dinamika Masyarakat Papua Pada Era Otonomi Khusus" dalam *Kritis: Jurnal Studi pembangunan Interdisiplin*. Vol XXI. No. 1. 2012.
- Wanggai, Toni Victor M., *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009

Website

- Geliat Dakwah di Kota Rusa Merauke. Suara Hidayatullah : Mei 2000/Muharram-Shafar 1421. Lihat <http://www.oocities.org/injusticedpeople/SHMeiGeliatDakwahdiKotaRusaMerauke.htm> akses 20 Oktober 2014.
- Kabupaten Merauke. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9101/merauke> Akses 22 Oktober 2014
- Perceraian di Merauke Tertinggi di Papua. <http://pontianak.tribunnews.com/2011/12/12/perceraian-di-merauke-tertinggi-di-papua> akses 22 Oktober 2014